

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gurajati, D. (2004). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba.
- Irianto, E. S. (2015). *Pajak kepemimpinan dan masa depan*. Semarang: Kantor Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah.
- Juanda, dan Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu: Aplikasi dan Teori*. Bogor: IPB Press.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Muchlis, I. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Cahaya Abadi.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rohmana, Y. (2010). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi dengan Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi & Koperasi. FPEB: UPI.
- _____ (2013). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi dengan Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi & Koperasi.
- Soemitro, Rochmat. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2004). *Statistika Edisi Kelima Jilid 1*. Bandung: Tarsito.
- _____ (2005). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2012). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2013). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Charge Publication.

Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Suryarini, T. dan Tarmudji, T. (2012). *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafrianto, L. D. (2007). *My Tax SPT-1770 S*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia: Buku 1 Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Yanti. (2013). *Ekonometri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan :

Pedoman Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Seksi Ekstensifikasi 2014 tentang Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak

Peraturan Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-35/PJ/2013 tentang tata cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2006 tentang *key performance indicator* penerimaan pajak penghasilan.

Surat edaran SE-51/PJ/2013 tentang himbauan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ke Kantor Pajak Pratama (KPP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sumber-sumber penerimaan pajak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

UU RI Nomor 14 tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang semua hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Penerimaan negara secara umum pendapatan suatu negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, bea cukai, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Sumber Jurnal Ilmiah :

Hayuningtyas, R. C. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Kegiatan Canvassing, Sosialisasi, Dan Surat Himbauan Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak* (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).

Kurnia, E. S., Kumadji, S., dan Azizah, D. F. (2015). *Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi* (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).

Yanda, R. O., & Ruhana, I. (2016). *Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).

Anti, M. W. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sumber Karya Tulis Ilmiah :

Herman, Anwar. (2014). *Pengaruh ekstensifikasi terhadap tingkat penerimaan pajak di kpp pratama gorontalo*. Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

- Hasibuan, I. A., Yunilma., dan Fauziati, P. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Padang*. Skripsi. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Lainutu, Amina. (2013). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap penerimaan pada KPP Pratama Manado*. Skripsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Lestari, Fina. (2016). *Pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap Tingkat penerimaan pajak penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Sukmawati, Widdyah. (2013). *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Skripsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Sumber Internet :

- ____(2011-2016) Laporan Penerimaan Pajak [online]. Tersedia: <http://www.kemenkeu.go.id> [23 Maret 2016]
- ____(2011-2016) Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan [online]. Tersedia: <http://www.kemenkeu.go.id> [14 April 2016]
- ____(2012-2014) Sensus Penduduk [online]. Tersedia: <http://www.bps.go.id>. [3 September 2014]
- Bojonegoro B. (2014). “masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan kurang menyisir orang pribadi”. <http://www.pajak.go.id>. (1 Mei 2014).
- Ruhaedi D. (2011). “hal tersebut dilakukan karena penerimaan pajak Jawa Barat per September 2011 masih baru mencapai 63,7% dari target Rp. 35,7 triliun”. <http://www.pajak.go.id>. (13 Oktober 2011).
- Sumihar. (2013) “Realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi dari semester 1-2010 baru mencapai sebesar Rp. 1,9 triliun atau 45,22% dari target dalam APBN 2010 sebesar Rp. 4,29 triliun sedangkan realisasi

penerimaan PPh Badan sampai semester 1-2010 mencapai Rp. 72,62 triliun atau 57,34% dari target'. *beritasatu.com*. (12 September 2013).